

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua Hal Pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan yaitu : 1) Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) Ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan manusia yang berkualitas.

Sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana serta diberi mandat untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan ketujuh yaitu Ambon Sejahtera yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan dimensi pembangunan kesehatan serta kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan Kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (*youth dependensi ratio*) di Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia kerja hampir 2 kali dibandingkan dengan jumlah penduduk dibawah 15 tahun. Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau *window of opportunity* untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pada saat yang bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal dalam pemanfaatan peluang demografi tersebut melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon merupakan dokumen perencanaan yg memuat program-program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yg bersifat indikatif yg akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017–2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 -2019.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yg sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan SKPD dan menjadi acuan dalam menyusun LAKIP.

Penyusunan dokumen ini tetap berpedoman pada RPJMD yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kota Ambon



1. UU RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

7. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;
12. Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon.
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006 – 2026
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam kurun waktu lima tahun yg mampu beradaptasi dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis.
2. Tujuan
 - a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yg konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
 - b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
 - c. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
 - d. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program–program yg telah direncanakan.
 - e. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, fungsi Rencana Strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis, keterkaitan rencana strategis dengan RPJMD, Renstra K/L dan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan dengan renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon. Juga termuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yg dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yg telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon yg telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yg masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, Telaahan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Telaahan RTRW dan KLHS dan isu-isu strategis.

BAB 4 TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.

BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB 7 INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon yg secara langsung menunjukkan kinerja yg akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB 8 PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun melalui Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, telaahan terhadap rancangan RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pemerintah Pusat, Kementrian Terkait dan Standar Pelayanan Minimal.

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon disusun untuk perencanaan, juga aplikasi dari RPJM Kota Ambon Tahun 2017-2022 yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Ambon, dan disusun secara *top down dan bottom up* berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, Provinsi, maupun Kota serta kondisi yang terjadi dalam Masyarakat.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon merupakan SKPD yg bertanggung jawab kepada Kota Ambon sebagai penyelenggara pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana khususnya dalam wilayah Kota Ambon. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon seperti yg tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon tersebut adalah :

- 1) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 2) Melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh atasan.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas

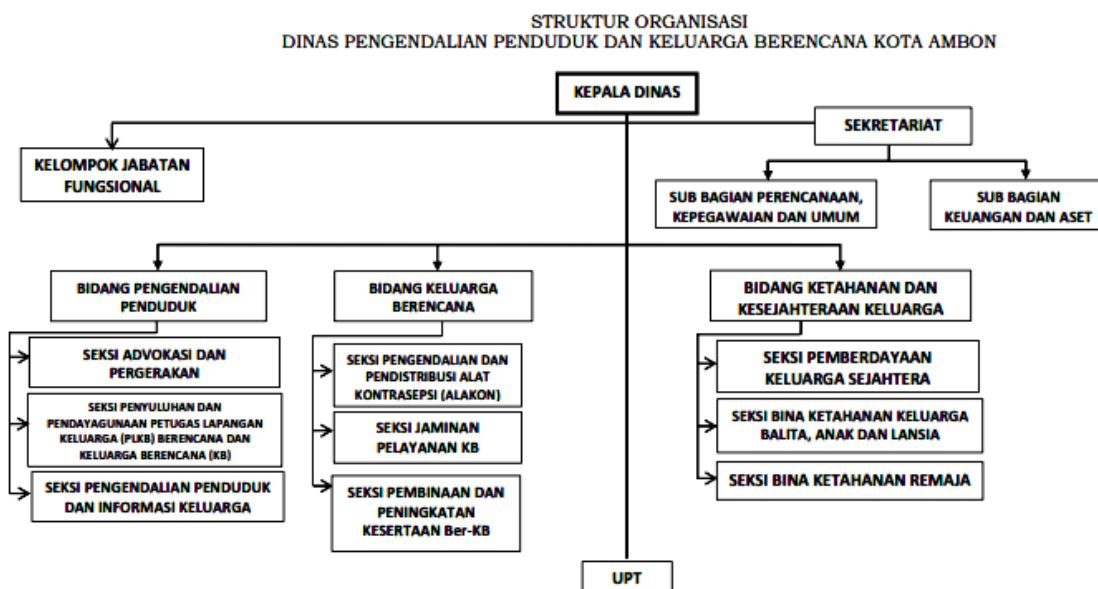
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
- ❖ Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas :
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan PKB
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- ❖ Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :
 - Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
 - Seksi Jaminan Pelayanan KB
 - Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB
- ❖ Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas :
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - Seksi Bina Keluarga Balita, Anak, dan Lansia
 - Seksi Bina Ketahanan Remaja
- ❖ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi lebih rinci diuraikan dalam Peraturan Walikota Ambon No: 4 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA AMBON



2.2. Sumber Daya DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA AMBON

Untuk penyelenggaraan upaya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai dengan pola dan manajemen upaya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dibutuhkan sumber daya yg memadai. Upaya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dapat berdayaguna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya tenaga, biaya dan sarana pelayanan KB terpenuhi.

1.) Tenaga

Jumlah tenaga PKB/PLKB di Balai Penyuluhan KB dan desa/kelurahan. Tahun 2016 sebanyak 21 orang dengan rasio 2,4 per desa bahwa 1 petugas PKB/PLKB bertanggung-jawab terhadap 2-3 desa, Ka.UPT/Pengawas sebanyak 5 orang, tenaga PNS pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon sebanyak 23 orang dan tenaga kontrak 6 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 55 orang. Jumlah tenaga PKB/PLKB di kota Ambon belum memadai, dimana target rasio petugas PKB/PLKB didesa/kelurahan 1 : 1 yaitu 1 orang bertanggung-jawab terhadap 1 desa/kelurahan tetapi di Kota Ambon 1 orang PKB/PLKB bertanggung jawab terhadap 2 – 3 Desa

2.) Sarana dan Pemasaran Penunjang

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh ketersediaan Sadarana dan prasarana berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Sampai dengan tahun 2016 berbagai sarana dan prasarana yang digunakan oleh Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon antara lain :

1. Kantor Dinas yang berdiri diatas lahan seluas 1.500 M2 dalam keadaan Rusak dan bocor dan harus segera di rehabilitasi
2. Ruang kerja seluas : 441M²
3. Ruang Rapat seluas : 48 M²
4. Gudang Obat 1 unit seluas : 24 M²
5. Kendaraan roda empat : 5 unit yang terdiri dari Kendaraan Kepala Dinas 1 Unit dan 4 unit Kendaraan operasional yaitu 1 unit Mobil Pelayanan KB dalam Kondisi Rusak, 1 Unit Mobil Penerangan KB, 1 Unit Mobil Antar Jemput Peserta KB dan 1 Unit Mobil Distribusi Alokasi
6. Kendaraan roda dua : 43 unit dalam keadaan rusak karena sudah berumur 10 tahun
7. Meja kerja Pimpinan : 2 set
8. Meja kerja Staf/Pegawai : 35 set
9. Meja Rapat : 6 set
10. Komputer : 10 unit
11. Infocus : 1 unit Rusak
12. Lemari arsip : 10 buah
13. Filling kabinet : 8 buah

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 14. Printer | : 10 unit 5 Rusak |
| 15. AC | : 10 unit 3 Rusak Berat |
| 16. Brangkas | : 1 buah |
| 17. Wirreless | : 1 unit |
| 18. Jaringan internet | : 1 paket |

3.) Sarana Pelayanan

- Sarana Layanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)**

Sarana layanan kesehatan di Kota Ambon yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu sebagai salah satu sumber tempat pelayanan kesehatan dan pelayanan KB kepada masyarakat di Kota Ambon beberapa tahun terakhir ini tidak mengalami peningkatan, Jumlah Puskesmas tercatat sebanyak 22 buah dan Puskesmas Pembantu sebanyak 35 buah sedangkan Rumah Sakit sebanyak 10 buah.

Tabel 2.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Ambon Per Kecamatan tahun 2014-2015

KECAMATAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan					
	Puskesmas		Puskesmas Pembantu		Rumah Sakit	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<i>Nusaniwe</i>	6	6	10	10	3	3
<i>Sirima</i>	8	8	4	4	3	3
<i>Baguala</i>	2	2	5	5	3	3
<i>Teluk Ambon</i>	4	4	8	8	1	1
<i>Leitimur</i>	2	2	8	8	0	0

Berdasarkan wilayah, jumlah Puskesmas terbanyak berada pada Kecamatan Sirima sebanyak 6 Puskesmas. Sedangkan Kecamatan yang memiliki Puskesmas terendah adalah Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 2 Puskesmas. Selain itu wilayah yang memiliki Rumah Sakit terbanyak berada pada Kecamatan Nusaniwe, Sirima, dan T.A. Baguala masing-masing 3 Rumah Sakit Serta kecamatan yang hanya memiliki satu buah Rumah Sakit adalah kecamatan Teluk Ambon. sedangkan wilayah yang tidak memiliki Rumah Sakit adalah Kecamatan Leitimur Selatan.

- **Klinik Keluarga Berencana**

Klinik pelayanan KB yang merupakan sarana pelayanan peserta KB di Kota Ambon mengalami kenaikan dari tahun 2013. Pada tahun 2013 terdapat 93 klinik KB dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 96 klinik KB dengan rincian 66 klinik KB Pemerintah dan 30 klinik KB Swasta. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan sampai tahun 2015.

***Tabel 2.2 Jumlah Klinik KB di Kota Ambon
Tahun 2013-2015***

<i>Status Klinik</i>	<i>Tahun</i>		
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Pemerintah</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
<i>Swasta</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Jumlah</i>	<i>93</i>	<i>96</i>	<i>96</i>

4.) Anggaran

Dalam melaksanakan upaya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga diperlukan pembiayaan yang memadai. Alokasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2016 termasuk Gaji PNS adalah sebesar Rp. 11.188.675.857 (.....%) dari total APBD Kota Ambon Untuk itu diharapkan pada tahun – tahun berikutnya alokasi anggaran KB khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keluarga berencana di Kota Ambon.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Ambon

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 55/HK-010/B5/2010									
a.	Total Fertility Rate (TFR)											
	Menurunnya Angka Kelahiran	2,00	Total Ferlility Rate (TFR)	2,28	2,24	2,20	2,00	2,24	2,20	2,15	2,00	
b.	Frevalensi dan Pembinaan Peserta KB Aktif											
	Meningkatnya Peserta KB Aktif	65%	Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)	72,50	73,10	74,00	75,00	73,10	75,14	76,00	77,00	
	Menurunnya Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	11,4	Prosentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmeet Need)	16,21	16,18	15,50	15,20	15,21	14,50	14,20	14,00	
	Menurunnya Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 16 – 19 Tahun (ASFR)	48/1000 kelahiran	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR)	40,00	39,50	38,00	37,50	39,50	30,5	30,00	29,50	
	Menurunnya Kehamilan yang tidak Diinginkan dari WUS (15-49) Tahun	7,1	Prosentase Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49) Tahun	6,9	6,8	6,7	6,6	6,8	6,7	6,6	6,5	

• Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon dari tahun 2010 s/d 2015 pada umumnya mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2011 pergerakan penurunannya sangat signifikan yakni dari 17,20 pada tahun 2010 menjadi 4,44 pada tahun 2011. Sedangkan hanya pada tahun 2013 gerakan Laju Pertumbuhannya mengalami peningkatan yakni dari 4,35 pada tahun 2012 menjadi 4,36 pada tahun 2013.

Berdasarkan data statistik, meskipun pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Ambon mengalami peningkatan, mencapai 411.617 jiwa, laju pertumbuhan penduduknya justru mengalami penurunan, menjadi 4,10%. Namun demikian, angka tersebut masih tergolong cukup tinggi. Artinya, dengan posisi jumlah penduduk Kota Ambon seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk Kota Ambon yang telah mencapai 1145,13 jiwa per Km².

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini diakibatkan oleh arus migrasi masuk ke Kota Ambon yang cukup tinggi pula. Arus migrasi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa Kota Ambon merupakan salah satu kota di provinsi Maluku yang memiliki daya tarik sangat kuat bagi pengembangan sektor ekonomi; usaha, perdagangan atau bisnis dan cukup memberi ruang bagi penyediaan lapangan pekerjaan.

JUMLAH DAN LPP KOTA AMBON PERKECAMATAN TAHUN 2010-2015

KECAMATAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	JUMLAH	PERTM BUHAN	JUMLAH	PERTUM BUHAN	JUMLAH	PERTUM BUHAN	JUMLAH	PERTUM BUHAN	JUMLAH	PERTUM BUHAN	JUMLAH	PERTM BUHAN
NUSANIWE	90.556	6,93	94.574	4,44	98.688	4,35	102.986	4,36	107.275	4,16	111.671	4,10
SIRIMAU	141.139	29,85	147.402	4,44	153.813	4,35	160.513	4,36	167.197	4,16	174.045	4,10
LEITIMUR SELATAN	9.473	13,50	9.894	4,43	10.324	4,35	10.773	4,36	11.222	4,17	11.682	4,10
T.A. BAGUALA	53.882	9,23	56.273	4,44	58.721	4,35	61.279	4,36	63.831	4,16	66.442	4,09
TELUK AMBON	38.747	24,42	40.465	4,44	42.225	4,35	44.064	4,35	45.898	4,16	47.777	4,09
KOTA AMBON	333.797	17,20	348.608	4,44	363.771	4,35	379.615	4,36	395.423	4,16	411.617	4,10

• Persebaran Penduduk

Secara demografis persebaran penduduk di Kota Ambon tidak merata. Sebagian besar penduduk Kota Ambon terkonsentrasi di Kecamatan Sirimau dengan tingkat kepadatan sebesar 2004,90 jiwa per Km². Hal ini disebabkan karena wilayah kecamatan Sirimau merupakan pusat perekonomian di Kota Ambon, dimana penduduk lebih cenderung untuk mendiami wilayah kecamatan Sirimau terutama bagi penduduk yang datang dari luar daerah sebagai migran untuk mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha ekonomi.

Untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di kecamatan Sirimau sebagai wilayah konsentrasi penduduk, pemerintah telah mengembangkan wilayah ekonomi baru di kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Teluk Ambon, sehingga kedua kecamatan tersebut telah menjadi perhatian banyak orang untuk cenderung berdomisili dan membuka tempat usaha. Sementara itu Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Leitimur Selatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang hanya sebesar 231,33 jiwa per km². Hal ini disebabkan karena kecamatan Leitimur Selatan merupakan kecamatan yang secara geografis terletak pada daerah pegunungan yang cukup jauh dari pusat perkotaan, sehingga kecenderungan penduduk untuk mendiami wilayah kecamatan ini sangat sedikit bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang ada di kota Ambon.

Tabal 2.4. Luas Daratan, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kota Ambon Dirinci Per Kecamatan Tahun 2010-2015

Nama Kecamatan	Luas Daratan		Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk Tiap Km2
	(Km2)	%	L	P	Jumlah		
Nusaniwe	88,35	24,58	55.020	56.651	111.671	97,12	1263,96
Sirimau	86,81	24,15	86.753	87.292	174.045	99,38	2004,90
Leitimur Selatan	50,50	14,05	5.798	5.884	11.682	98,54	231,33
T.A. Baguala	40,11	11,16	33.766	32.676	66.442	103,34	1656,49
Teluk Ambon	93,68	26,06	24.347	23.430	47.777	103,91	510,00
Kota Ambon							
2015	359,45	100,00	205.684	205.933	411.617	99,88	1145,13
2014	359,45	100,00	197.529	197.894	395.423	99,82	1100,08
2013	359,45	100,00	189.728	189.887	379.615	99,92	1056,10
2012	359,45	100,00	181.893	181.878	363.771	100,00	1012,02
2011	359,45	100,00	174.160	174.448	348.608	99,83	969,84
2010	359,45	100,00	166.858	166.939	333.797	99,95	928,63

- **Fertilitas dan Faktor Fertilitas yang Mempengaruhi**
 - a. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)**

Kota Ambon merupakan salah satu kota di provinsi Maluku yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dan angka TFR nya masih diatas 2 %. Berdasarkan data Susenas, TFR Kota Ambon masih stagnan dimana dari 2,21 anak per wanita usia subur pada tahun 2010, menurun menjadi 2,17 anak per wanita usia subur di tahun 2012. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2,20 anak per wanita usia subur. Angka ini menunjukkan bahwa TFR Kota Ambon masih harus terus di tekan, namun masih lebih baik bila dibandingkan dengan kota/kecamatan yang lain di provinsi Maluku

- b. **Angka Fertilitas Menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR)**

ASFR adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Data Susenas 2010, 2012 dan 2015 menunjukkan.

Tabel Fertilitas Menurut Kelompok Umur 2010-2012 dan 2015

Kel. Umur Wanita (Age Group)	2010	2012	2015
15-19	18	21	11
20-24	48	100	44
25-29	118	102	136
30-34	133	113	105
35-39	99	71	73
40-44	18	22	11
45-49	16	6	0
TFR	2.21	2.17	2,24

Sumber : Susenas 2010, 2012, 2015, BPS

Data Susenas di atas menunjukkan bahwa puncak ASFR adalah berada pada angka 133 per 1000 perempuan umur 30-34 tahun di tahun 2010 dan 113 per 1000 perempuan umur 30-34 di tahun 2012 serta 136 per 1000 perempuan umur 25-29 di tahun 2015.

- c. **Pola Perkawinan Pertama**

SMAM adalah perkiraan estimasi rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). SMAM Kota Ambon berdasarkan SP 2010 adalah 22,8.

d. Kesertaan ber-KB

Kesertaan ber-KB di Kota Ambon cukup tinggi, hal ini terlihat dari jumlah akseptor KB yang melebihi target yang telah ditetapkan pada dua tahun terakhir.

Tahun 2014 pencapaian jumlah akseptor baru yaitu 9.247 akseptor (143,23%) dari target yang ditetapkan sebesar 6.456 akseptor, sedangkan tahun 2015 realisasi pencapaian jumlah akseptor baru yaitu 6.655 akseptor (118,67) dari target yang ditetapkan sebesar 5.608 akseptor.

Tabel 2.7 Target dan Realiasi Akseptor Baru Kota Ambon Tahun 2008-2012

<i>Tahun</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Persentase</i>
2015	5.608	6.655	118,67
2014	6.456	9.247	143,23
2013	9.410	7.832	83,23

Sumber : BKKBD Kota Ambon, 2015

Pencapaian peserta KB Aktif di Kota Ambon sudah cukup baik, namun pada tahun 2015 terjadi sedikit penurunan dan tidak terlalu berarti.

Tahun 2013 realisasi pencapaian peserta KB Aktif yaitu sebesar 35.011 akseptor (215,73 %) dari target yang ditetapkan sebesar 16.229 Tahun 2014 realisasi pencapaian peserta KB Aktif yaitu sebesar 31.744 akseptor (135,14%) dari target yang ditetapkan sebesar 23.489 akseptor, sedangkan pada tahun 2015 pencapaiannya mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 34.119 akseptor (93,85 %) dari target yang ditetapkan sebesar 36.356 Akseptor. Keberhasilan dalam pembinaan peserta KB akan mampu menurunkan angka kelahiran secara baik.

Tabel 2.8 Target dan Realiasi Akseptor Aktif Kota Ambon Tahun 2008-2012

<i>Tahun</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Persentase</i>
2015	36.356	34.119	93,85
2014	23.489	31.744	135,14
2013	16.229	35.011	215,73

Sumber : BPMP dan KB Kota Ambon, 2015

Tabel. 2.4
Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2015 -2016

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	%
1	Total Fertility Rate (TFR)	2.24	2,30	2,20	104,5
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	73,10	74	75,14	101,5%
3	Prosentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Baru	20.82	21	21.02	100,10
4	Prosentase Peserta KB Baru Pria	0.83	0,85	0.84	98,82
5	Prosentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	15.21	14.50	14.48	100,14
6	Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah Usia 20 Tahun	2.75	2,50	2,15	116,28
7	Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15 – 19 Tahun (ASFR)	39,5	30,5	29,6	103,4

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pembangunan urusan kependudukan dan keluarga berencana selama tahun 2015 telah mencapai hasil yang baik terutama ditandai dengan penurunan TFR dari 2,24 % pada tahun 2015 menjadi 2,20 % pada tahun 2016 dan peningkatan (Contraceptive Prevalence rate/CPR) dari 73,10% dari PUS 46.708 di tahun 2015 menjadi 75,14% dari PUS 45.237 di tahun 2016. Sementara itu dalam upaya pendewasaan usia perkawinan tingkat pencaiahan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2016 relatif stabil walaupun mengalami peningkatan sebesar 0,6% dari sebelumnya yaitu 2,75% pada tahun 2015 menjadi 2,15 % di tahun 2016.

Selain itu, kami berhasil menurunkan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) yaitu dari 15,21% di tahun 2015 menjadi 14,48% di tahun 2016. Di lain sisi, tingkat partisipasi Pria dalam ber-KB jika dilihat dari data prosentase KB baru Pria terlihat sangat rendah yaitu 0,84% dan tidak mengalami perbaikan atau kenaikan yang berrarti jika dibandingkan dengan tahun 2015. Data tersebut mrnunjukan bahwa prosentase peserta KB pria sangat rendah jika dibandingkan dengan peserta KB aktif wanita. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa KB merupakan urusan wanita saja, selain itu adanya kekhawatiran pria dalam menggunakan alat kontrasepsi MOP dapat menurunkan libido. Angka Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2016 adalah 75.14% yaitu terjadi peningkatan sebesar 2,04 % jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 73.10% dengan komposisi penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek terutama suntik masih mendominasi.

- **Mortalitas dan Faktor yang Mempengaruhi**
 - a. **Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate)**

Kematian bayi menggambarkan peluang untuk meninggal antara kelahiran dan sebelum mencapai umur tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kematian neonatum dan post-neonatum. Kematian Neonatum menggambarkan peluang untuk meninggal dalam bulan pertama setelah lahir, sedangkan kematian post-neonatum menggambarkan peluang untuk meninggal setelah bulan pertama tetapi sebelum umur tepat satu tahun. Data Dinas Kesehatan Kota Ambon menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di kota Ambon masih cukup tinggi yakni : 4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 angka tersebut tidak mengalami perubahan yakni 4 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut lebih rendah dari angka nasional 42/100.000 kelahiran hidup.

- b. **Angka Kematian Balita**

Kematian balita menggambarkan peluang untuk meninggal diantara kelahiran dan sebelum umur tepat lima tahun. Pada tahun 2014 kasus kematian balita adalah sebanyak 12 per 1000 anak usia di bawah 5 tahun. Angka tersebut dikategorikan lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku 12,7 per 1000 anak usia di bawah 5 tahun.

- c. **Angka Kematian Ibu**

Kasus kematian ibu yang disebabkan karena komplikasi kehamilan dan kelahiran di Kota Ambon masih cukup tinggi yaitu 27 per 100.000 kelahiran hidup.

- **Angka Kematian Bayi, Balita, Ibu Melahirkan Per Kecamatan Tahun 2014-2015**

KECAMATAN	KASUS					
	Angka Kematian Bayi		Angka Kematian Balita		Angka Kematian Ibu	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Nusaniwe	14	14	2	1	2	1
Sirima	7	7	3	4	0	1
Baguala	4	5	1	0	0	1
Teluk Ambon	2	2	0	1	0	3
Leitimur	0	4	0	1	0	0

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon

Berdasarkan isu-isu yg berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yg akan di ambil dalam pencapaian Misi dan Visi organisasi.

Analisis lingkungan internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

KEKUATAN (STRENGTH)

- Dana tersedia secara berkesinambungan.
- Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yg telah dituangkan Peraturan Walikota Ambon.
- Memiliki Kader yang aktif dan motivasi yang kuat.
- Memiliki fasilitas Layanan KB di rumah sakit dan puskesmas
- Akses pelayanan kesehatan relatif muda
- Tersedia peralatan penunjang kegiatan seperti alat audio visual dan komputer.

KELEMAHAN (WEAKNESS)

- Anggaran terbatas
- Kualitas dan Kuantitas Kader masih kurang
- Lemahnya koordinasi antar instansi terkait
- Kurangnya tenaga PKB dan PLKB

PELUANG (OPPORTUNITY)

- Komitmen mendukung program KB.
- Surat Edaran Mendagri Nomor 900/Tahun 2014 memperkuat peran FKTP Pemda sukseskan program JKN.
- Komitmen Fapsedu dan Koalisi kependudukan yang kuat dalam mendukung program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

TANTANGAN/ANCAMAN (THREAT)

- Kemampuan Anggaran Daerah Terbatas
- Budaya Patriakhi yang kuat

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yg dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon. Berikut ini beberapa permasalahan yg berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, meliputi:

- 1) Tingginya penambahan penduduk non kelahiran (migrasi) di kota ambon
- 2) Prevalensi pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate) / CPR bervariasi yang didominasi oleh metode non MKJP sehingga berpengaruh terhadap tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) peserta KB
- 3) Masih tingginya anak yang diinginkan dari setiap keluarga yang ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,20% tahun 2016
- 4) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan.
- 5) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (un need meet) masih tinggi yaitu 14,48%
- 6) Rendahnya peserta KB pria 0,84% dikarenakan masih beranggapan bahwa KB merupakan urusan wanita serta adanya kekuatiran pria dalam menggunakan alat kontrasepsi
- 7) Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 tahun (ASFR) masih tinggi yaitu 2,15% sehingga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai reproduksi dan penyiapan berkeluarga dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan.
- 8) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi yaitu 27,1 %
- 9) Kualitas Pelayanan KB belum sesuai standart yaitu berkaitan dengan persebaran tenaga kesehatan yang berkompeten dalam pelayanan KB, dimana sebagian besar bidan KB belum bersertifikat CTU.
- 10) Jaminan Pelayan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan JKN.
- 11) Masih tingginya Keluarga Miskin
- 12) Pengetahuan orang tua melalui pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak
- 13) Partisipasi pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah.
- 14) Kualitas hidup lanjut usia (Lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal.
- 15) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- 16) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB, Disamping itu kelompok kegiatan/POKTAN yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan kemajuan yg telah dicapai pada periode 2017-2022; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Ambon yg terpilih untuk masa bakti 2017-2022; berpedoman pada RPJPD Kota Ambon 2006 - 2026; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dalam RPJMD Tahun 2014 - 2019 dan prioritas pembangunan nasional yg tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yg tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka **visi pembangunan Kota Ambon Tahun 2017–2022 adalah:**

“.AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS ”

VISI tersebut mengandung makna bahwa :

HARMONIS adalah masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga tercapai harmonisasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang saling menghargai sebagai sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip pela gadong. Nilai-nilai pela gandong yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran. Toleransi antar masyarakat dan umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama dan etnik. Oleh karena itu, peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis di Kota Ambon. Kerukunan adalah sikap hidup warga kota yang rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman dan tentram. Yang dimaksudkan dengan Sejahtera dalam visi ini adalah menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, social dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah-sekolah berskala internasional ataupun World Class School di Kota Ambon. Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di Kota Ambon dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program-program sehat Kota Ambon dengan

target capaian selama periode pemerintahan kota. Hukum yang maju dalam visi ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap penyelenggaraan dan penegakan hukum di masyarakat dengan tujuan terjadinya ketertiban, ketaatan dan kepatuhan di bidang hukum serta menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Ekonomi yang maju mengidentifikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya industry menengah berbasis sumber daya alam local yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta berkembangnya industry pariwisata yang memacu peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon. Religius sebagai salah satu nilai karakter dimana saat ini Indonesia sedang giat membangun pendidikan karakter guna mendidik warga bangsa menjadi manusia yang berakarakter. Yang dimaksud religius dalam visi ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan **MISI** pembangunan Kota Ambon Tahun 2017-2022, adalah :

- (1). Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial;
- (2). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- (3). Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumber daya alam yang tersedia;
- (4). Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ambon yg akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Ambon Tahun 2017-2022 yang berhubungan dengan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan Misi Kedua.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua

Sesuai dengan Misi Kedua: Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia ; serta memperhatikan tujuan ke tiga dan kelima dari Tujuan Pembangunan Milenium, dan Prioritas Pembangunan Nasional kelima dari RPJMN 2015-2019, maka tujuan dan sasaran pembangunan yg akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia, dengan agenda

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (dalam Nawa Cita) untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

3.3. Telaahan Renstra BKKBN 2015-2019

3.3.1. Telaahan Renstra BKKBN

Visi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah “ Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas ”

Dari Visi tersebut dirumuskan Misi sebagai berikut :

- 1) Mengutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
- 4) Membangun dan menerapkan. Budaya kerja organisasi secara konsisten
- 5) Membanguna Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Tujuan BKKBN adalah Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas, meningkatkan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta penguatan tata kelola, penelitian dan pengembangan bidang Keluarga Berencana.

Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka Kelahiran Totak (TFR) per WUS (15 – 49 tahun);
3. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5. Menurunnya Angka Kelahiran pada Remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dan WUS (15 – 49 tahun).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

33.4.1. Telaahan Terhadap RTRW Kota Ambon

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Ambon 2011-2031
 - a. Mewujudkan ruang wilayah Kota Ambon yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan memperhatikan RTRW Provinsi Maluku dan RTRW Nasional
 - b. Mewujudkan peran dan kedudukan Kota Ambon sebagai Kota Jasa di Kawasan Timur Indonesia.
 - c. Mewujudkan Kota Ambon sesuai kondisi dan karaktersitik wilayahnya sebagai *waterfront city* dan *ecocity* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
2. Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah adalah :

Tersusunnya tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Ambon.

 - a. Tersusunnya rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota Ambon
 - b. Tersusunnya kawasan strategis kota yang terdiri dari wilayah darat dan laut
 - c. Tersusunnya arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama untuk jangka waktu lima tahunan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Ambon

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan, yaitu:

 - a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang meliputi:
 1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Ambon

Strategi yang dilaksanakan untuk pengembangan Struktur Ruang adalah:

- 1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki meliputi:
 - a. Mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota, serta dengan wilayah di sekitarnya
 - b. Mendorong perkembangan sub-sub pusat pelayanan eksisting agar lebih optimal dalam mendukung perkembangan kawasan.
 - c. Mengembangkan sub-sub pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan.
- 2) Dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air serta prasarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Ambon meliputi:
 - a) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi

- b) Mengembangkan jaringan prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah
- c) Mengembangkan kapasitas pelayanan energi listrik hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal
- d) Mengembangkan sumber daya air untuk melindungi, memanfaatkan, dan mengendalikan sumber daya air
- e) Mengembangkan pelayanan jaringan telekomunikasi sesuai dengan arah pengembangan kota, terutama di kawasan yang terpencil atau belum terlayani
- f) Mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan
- g) Mengembangkan kapasitas pelayanan persampahan hingga mencapai wilayah yang belum terlayani dan mengamankan kawasan perairan Teluk Ambon
- h) Mengembangkan sistem jaringan drainase untuk mengendalikan genangan air dan banjir
- i) Mengembangkan sistem pembuangan air limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan perairan Teluk Ambon
- j) Mengembangkan prasarana pejalan kaki pada wilayah yang mempunyai bangkitan lalu lintas yang tinggi
- k) Mengembangkan jalur evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.

b. Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang meliputi:

- 1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung:
 - a) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b) Penetapan kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.
- 2) Kebijakan dan Strategi pengembangan kawasan Budidaya:
 - a) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi yang dilaksanakan untuk pengembangan Pola Ruang adalah:

- 1) Menetapkan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis untuk mewujudkan fungsi Kota Ambon sebagai kota jasa, pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat wisata dan pusat sejarah.
- 2) Mengembangkan potensi sumber daya pesisir pantai dan teluk Ambon guna mewujudkan *Ambon Waterfront City* dan *Ecocity* bagi pembangunan berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan kegiatan-kegiatan perkotaan modern dengan berlandaskan nilai-nilai budaya Ambon.

- 4) Mengembangkan kegiatan-kegiatan unggulan pada masing-masing Pusat Kota dan Sub Kota untuk mendorong perkembangan fungsi masing-masing pusat dengan memperhatikan keterkaitan Gugus Pulau Ambon-Lease
 - 5) Mendorong perkembangan kawasan pinggiran kota dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih tinggi dan dapat memberikan nilai tambah ekonomi
 - 6) Mengembangkan ruang yang aman dan nyaman terhadap bencana.
 - 7) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana
 - 8) Mengembangkan perkotaan pulau kecil dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak
 - 9) Membatasi perkembangan kawasan terbangun di sekitar kawasan cagar budaya untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah Kota Ambon
 - 10) Membatasi perkembangan kawasan terbangun di sekitar kawasan mata air dan wilayah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan sumber air baku
 - 11) Mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau kecil
 - 12) Mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan kota.
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis meliputi:
- 1) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kota Ambon yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi tinggi maupun tepat guna
 - 2) Pelestarian dan peningkatan kehidupan sosial dan budaya
 - 3) Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam, serta pengembangan kawasan riset dan wisata ilmiah.

Strategi yang dilaksanakan untuk pengembangan Kawasan Strategis adalah:

- 1) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah
- 2) Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan
- 3) Mengintensifkan promosi peluang investasi
- 4) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kegiatan ekonomi
- 5) Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan melalui keterkaitan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- 6) Melestarikan situs warisan budaya Ambon
- 7) Mendorong pengembangan kawasan wisata dan sejarah

Sesuai tujuan, strategi dan kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Ambon 2011-2031 dapat ditelaah sebagai berikut:

BAPPEDA LITBANG Kota Ambon dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dapat melakukan penyelarasan tujuan, strategi dan kebijakan RTRW Kota Ambon dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan pada dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) sehingga pelaksanaan pembangunan tidak menyalahi aturan pemanfaatan ruang dan mendorong terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif, terkendali serta berkelanjutan di Kota Ambon.

1.4.2. Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Ambon

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. KLHS merupakan amanat dari Undang - Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. Dari penyusunan KLHS Kota Ambon, ditemukan isu-isu lingkungan hidup yang strategis di Kota Ambon antara lain:

1. Alih fungsi dan konversi lahan
2. Kuantitas dan kualitas air
3. Degradasi kawasan pesisir dan laut
4. Mitigasi bencana
5. Pencemaran Lingkungan
6. Kemerosotan keanekaragaman hayati

7. Akses Transportasi
8. Ketersediaan Energi Listrik
9. Sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan lingkungan dan masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis, adapun yang penting dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Melakukan verifikasi terhadap usulan Program/Kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan fungsi dan peruntukan ruang
2. Melakukan diseminasi hasil penelitian bekerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan:
 - a. Kualitas dan kuantitas mutu air
 - b. Degradasi kawasan pesisir
 - c. Kemerosotan keanekaragaman hayati
 - d. Pencemaran lingkungan
 - e. Sosial budaya kehidupan masyarakat
 - f. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui potensi daerah
3. Melakukan integrasi hasil mitigasi bencana, rekomendasi penilaian ketangguhan dan kajian kerentanan ke dalam RPJM dan RKPD Kota Ambon
4. Mengintegrasikan masterplan Tataran Transportasi Lokal Kota Ambon kedalam dokumen perencanaan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam lima tahun (2017-2022) mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya pertambahan penduduk non kelahiran (migrasi) di kota ambon
- 2) Prevalensi pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate) / CPR bervariasi yang didominasi oleh metode non MKJP sehingga berpengaruh terhadap tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) peserta KB
- 3) Masih tingginya anak yang diinginkan dari setiap keluarga yang ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,20% tahun 2016
- 4) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan.
- 5) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (un need meet) masih tinggi yaitu 14,48%
- 6) Rendahnya peserta KB pria 0,84% dikarenakan masih beranggapan bahwa KB merupakan urusan wanita serta adanya kekuatiran pria dalam menggunakan alat kontrasepsi
- 7) Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 tahun (ASFR) masih tinggi yaitu 2,15% sehingga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai reproduksi dan penyiapan berkeluarga dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan.
- 8) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi
- 9) Kualitas Pelayanan KB belum sesuai standart yaitu berkaitan dengan persebaran tenaga kesehatan yang berkompeten dalam pelayanan KB, dimana sebagian besar bidan KB belum bersertifikat CTU.

- 10) Jaminan Pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan JKN.
- 11) Masih tingginya Keluarga Miskin
- 12) Pengetahuan orang tua melalui pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak
- 13) Partisipasi pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah.
- 14) Kualitas hidup lanjut usia (Lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal.
- 15) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 16) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB, Disamping itu kelompok kegiatan/POKTAN yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2017 - 2022 pada Misi Kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Program Prioritas Pembangunan No. 7 (tujuh) yaitu untuk "Ambon Sejahtera"

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon

Dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan penduduk yang berkualitas dan berdaya saing, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan berupaya dengan Tujuan

1. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

2. Meningkatkan Pembinaan Peserta KB dengan menguatkan pelayanan KB yang merata dan Berkualitas

Menggunakan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam Program KKBPK untuk pengendalian fertilitas atau menekan pertumbuhan penduduk yang paling efektif. Didalam pelaksanaannya diupayakan agar semua metode kontrasepsi yang disediakan dan ditawarkan kepada masyarakat memberikan manfaat optimal dengan meminimalkan efek samping maupun keluhan yang ditimbulkan. Metode kontrasepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (Non MKJP).

3. Meningkatkan Pemahaman Remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian penduduk di Indonesia namun juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalam memperbaiki derajat kesehatan masyarakat.

Pada pasal 47 ayat (1) undang undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya pada pasal 48 disebutkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

Melalui tujuan strategis meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon ingin agar remaja di Kota Ambon memiliki pengetahuan tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi agar terhindar dari kehamilan dan melahirkan di usia remaja

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	Menurunkan Laju Pertumbuhan penduduk	Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,55
		Menurunkan Angka kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,15	2,10	2,05	2,00	1,95	1,90
2	Meningkatkan Pembinaan Peserta KB dengan Memperkuat Pelayanan KB yang merata dan berkualitas	Meningkatnya Peserta KB Aktif Bagi Pasangan Usia Subur	Prosentase Peserta KB Aktif (CPR)	73,25	73,35	73,50	73,80	74,00	74,00
		Menurunkan Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Prosentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmeet Need)	14,30	14,20	13,80	13,60	13,20	13,10
		Menurunkan Drop Out Peserta KB	Prosentase Drop Out Peserta KB	17,70	17,50	17,30	17,20	17,10	17,00
3	Meningkatkan Pemahaman Remaja Mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Menurunkan Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun	Prosentase Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun	29,40	29,20	29,10	28,90	28,80	28,70
			Prosentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	2,10	2,05	2,00	1,95	1,90	1,85

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022, maka perlu strategi dan arah kebijakan yg terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, maka yang akan menjadi focus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang yang dilakukan melalui :

- a. penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan kependudukan dan keluarga berencana;
- b. koordinasi terpadu lintas - sektor terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan KKB;
- c. perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas;
- d. advokasi, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan Program KKBPK kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat.
- e. meningkatkan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan yang holistik;
- f. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
- g. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan;

2. Meningkatkan Pembinaan Peserta KB dengan Memperkuat Pelayanan KB yang merata dan berkualitas, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antar - sektor terutama dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon);
- b. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB;
- c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit;
- d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.
- e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.
- f. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
- g. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan);
- h. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi

keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;
- b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka; dan
- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM)

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) KB, serta peningkatan kapasitas SDM pelaksana KB (tenaga lapangan, kader, tenaga medis) secara berkala dan menyeluruh dalam hal advokasi, KIE, serta konseling KB dan kespro;
- b. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB serta pengembangan kemitraan operasional KB didukung dengan panduan teknis yang jelas.

5. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi - KIE tentang KB dan kespro yang sinergi antar sektor yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung SJSN Kesehatan (materi dan *tools* melalui pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku dalam ber-KB yang disesuaikan dengan isu KKB di masing - masing wilayah);
- b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran

target masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;

- c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi;
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Fokus penetapan Kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:

- a. Menjamin tercapainya penurunan TFR sesuai target yang ditetapkan;
- b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus demografi;
- c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
- d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pemerintah juga menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan:

- 1. Perencanaan kependudukan;
- 2. Penyediaan parameter kependudukan;
- 3. Analisis dampak kependudukan;
- 4. Kerjasama pendidikan kependudukan;
- 5. Penanganan isu - isu kependudukan

Hal tersebut diatas dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui advokasi, KIE, serta penyediaan sarana - prasarana Program KKBPK. Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS yang dilakukan melalui Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga yang diarahkan untuk:

- Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
- Memberdayakan fungsi keluarga;
- Memandirikan keluarga;
- Memberdayakan kearifan lokal;
- Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
- Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
- Memberdayakan peran serta masyarakat.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua Hal Pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan yaitu :

- 1) Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan,
- 2) Ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan manusia yang berkualitas.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon 2017-2022 maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif yang dijelaskan dalam table 6.1 dibawah ini :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI MALUKU KOTA AMBON**

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						404,178,625		405,187,500		627,000,000		689,700,000		758,670,000		834,537,000		
		Sosialisasi Delapan Fungsi Keluarga bagi Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon							100 Org	150,000,000	100 Or	165,000,000	101 Or	181,500,000	101 Or	199,650,000		
		Pameran Pembangunan KKBPk tingkat Kota Ambon							2 Paket	50,000,000	2 Pake	55,000,000	3 Pake	60,500,000	3 Paket	66,550,000		
		Penggarapan dan Kerjasama Tim KB							100 Kader	100,000,000	100 Kader	110,000,000	101 Kader	121,000,000	101 Kader	133,100,000	DPPKB	Ambon
		Pembentukan Kampung KB	Terbentuknya Kampung KB						2 KKB		2 KKB		3 KKB		4 KKB			
		Keluarga Berencana/ Keluarga Sejahtera Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Prosentase Peserta KB Aktif Terlaksananya Pelayanan KB bagi keluarga Miskin	600 Pus	600 Pus	74,884,300	600 Pus	80,000,000	600 Pus	95,000,000	600 Pus		601 Pus		601 Pus		DPPKB	Ambon
												104,500,000		114,950,000		126,445,000		
		Pertemuan Teknis Medis	Terlaksananya Pertemuan Teknis Medis	125 Org	125 Org	48,786,000	125 Org	50,000,000	125 Org	50,000,000	125 Org	55,000,000	126 Org	60,500,000	126 Org	66,550,000	DPPKB	Ambon
	Menurunnya Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Duta Orang Tua Hebat Tingkat Nasional							3 Orang	45,000,000	3 Oran	49,500,000	4 Oran	54,450,000	4 Oran	59,895,000		
		Pelayanan KB Keliling (KB Mobile)	Terlaksananya Pelayanan KB	1000 Pus	1000 Pus	50,164,500	1000 Pus	55,000,000	1000 Pus	80,000,000	1000 Pu	88,000,000	1001 Pu	96,800,000	1001 Pu	106,480,000	DPPKB	Ambon
		Pelatihan Petugas Pemutahiran Data pendataan Keluarga Sejahtera	tersedianya Petugas Pendata keluarga Sejahtera	50 Org	50 Org	14,717,700	50 Org	15,000,000	100 Org		100 Org		101 Org		102 Org		DPPKB	Ambon
		Pemutahiran data Keluarga Sejahtera	Tersedia Data Keluarga Sejahtera	1 Dok	1 Dok	34,000,000	1 Dok	34,000,000	1 Dok		1 Dok		2 Dok		3 Dok		DPPKB	Ambon
		Orientasi Bidan Tentang Pelaporan (R/R) Pelayanan KB	Tersedianya Pelaporan Pelayanan KB	100 Org	100 Org	15,744,500	100 Org	20,000,000	100 Org	35,000,000	100 Org	38,500,000	101 Org	42,350,000	101 Org	46,585,000	DPPKB	Ambon
		Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD tentang Program KB	Kader Memahami Progran KB	150 Kdr	150 Kdr	39,050,000	150 Kdr	40,000,000	150 Kdr	50,000,000	150 Kdr	55,000,000	151 Kdr	60,500,000	151 Kdr	66,550,000	DPPKB	Ambon
		Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya Harganas	7 Org	7 Org	99,008,000	7 Org	99,008,000	7 Org	150,000,000	7 Org	165,000,000	7 Org	181,500,000	7 Org	199,650,000	DPPKB	L.daerah
		Sosialisasi Manajemen di 15 Kampung KB							30 Org	45,000,000	30 Org	49,500,000	30 Org	54,450,000	30 Org	59,895,000		
		Pembentukan Kampung KB Tk. Kecamatan	Tersedianya Kampung KB	1 K.KB	4 K.KB	59,403,500			4 K.KB		4 K.KB		5 K.KB		6 K.KB		DPPKB	Ambon
		Sosialisasi Hasil Pendataan dan Serasehan Hasil Pendataan (PUS)	Terlaksanya Sosialisasi Hasil pendataan		100 Org	27,815,450	100 Org	30,000,000	100 Org	20,000,000	100 Org	22,000,000	100 Org	24,200,000	100 Org	26,620,000	DPPKB	Ambon
		Pelatihan dan Pendataan Pasangan Usia Subur							100 Org	84,220,500	100 Org	92,642,550	100 Org	101,906,805	100 Org	112,097,486		
		Sosialisasi Orang Tua Hebat							100 Org	100,000,000	100 Or	110,000,000	100 Or	121,000,000	100 Or	133,100,000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
reproduksi	Meningkatkan Tata Kelola Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pelatihan Kader BKB	Tersedianya Kader BKB yg Handal			404,178,625		405,187,500	150 Org	627,000,000	150 Org	689,700,000	151 Org	758,670,000	152 Org	834,537,000	DPPKB	Ambon
		Keluarga Berencana/ Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Peserta KB Aktif	73,00	73,25		73,35		73,50		73,50		73,51		73,52			
		Lomba KB Lestari Tingkat Nasional	Terlaksananya Lomba KB Lestasri	3 Org	3 Org	38,507,500	3 Org	40,000,000	3 Org	40,000,000	3 Org	44,000,000	4 Org	48,400,000	4 Org	53,240,000	DPPKB	Ambon
		Penggerakan MKJP	Terlaksananya Pelayanan MKJP	50 Ds	50 Ds	97,626,000	50 Ds	100,000,000	50 Ds		50 Ds		51 Ds		52 Ds		DPPKB	Ambon
		Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB															
		Gebyar Lansia BASENA (Bahagia, Sejahtera, Berguna)							100 Lansia	125,000,000	100 Lansia	137,500,000	101 Lansia	151,250,000	101 Lansia	166,375,000		
		Pembentukan COE (Centre of Excellnt) BKL Tingkat Kota Ambon							100 Org	35,000,000	100 Or	38,500,000	100 Or	42,350,000	100 Or	46,585,000		
		Promosi KB/KR Bagi Remaja	Meningkatnya Partisipasi Kader dlm Pelayanan KB				3 Org	45,000,000	150 Org	45,000,000	150 Or	49,500,000	150 Or	54,450,000	150 Or	59,895,000	DPPKB	Jakarta
		Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan KB (DAK)																
		Pengadaan Implant Kit	Tersedia Impalnt Kit		20 Set	150,000,000	25 Unit	180,000,000	25 Unit	180,000,000	25 Unit	198,000,000	25 Unit	217,800,000	25 Unit	239,580,000	DPPKB	Ambon
		Pengadaan BKL Kit	Tersedia BKL Kit		30 Set	165,000,000												
		Pengadaan Genre Kit	Tersedia genre Kit		8 Set	180,000,000	8 Unit	195,000,000	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		DPPKB	Ambon
		Pengadaan KIE Kit	Tersedia KIE Kit		14 Set	100,100,000	20 Unit	150,000,000										
		Pengadaan Media/Alat Pengolahan Data	Tersedia Alat Pengolahan Data		18 Unit	144,900,000												
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan KB		15 Unit	180,000,000	15 Unit	195,000,000	20 Unit	220,000,000	20 Unit	242,000,000	20 Unit	266,200,000	20 Unit	292,820,000		
		Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/ALOKON	Tersedianya Tempat Penyimpanan KIT/ALOKON															
		Pengadaan Saran PPKBD dan Sub PPKBD	Tersedianya Sarana PPKBD dan Sub PPKBD							195,000,000		214,500,000		235,950,000		259,545,000		
		Operasional Balai penyhuluhan KB (DAK)	Tersedia Operasional balai	5 Balai	5 Balai	418,800,000	5 Balai	1,659,000,000	5 Balai	513,000,000	5 Balai	564,300,000	6 Balai	620,730,000	6 Balai	682,803,000	DPPKB	Ambon
		Pengadaan Sarana dan Parasarana PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB	Tersedia Sarana dan Prasarana PLKB	35 Set	35 Set	315,000,000			15 Unit		15 Unit		16 Unit		17 Unit		DPPKB	Ambon
		Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase Pasangan Usia Subur yg Istrinya di Bawah 20 tahun	2,10	2,10		2,05		2,00		2,00		2,01		2,02			
		Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi		100 Org	100 Org	24,504,450	100 Org	25,000,000	100 Org	25,000,000	100 Org	27,500,000	101 Org	30,250,000	101 Org	33,275,000	DPPKB	Ambon

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Remaja				404,178,625		405,187,500		627,000,000		689,700,000		758,670,000		834,537,000		
		Konsultasi Program Caturbina							3 Orang	50,000,000	3 Orang	55,000,000	3 Orang	60,500,000	3 Orang	66,550,000		
		Jambore Ajang Kreativitas (JAK) Remaja Tingkat Nasional							7 Orang	95,000,000	7 Orang	104,500,000	7 Orang	114,950,000	7 Orang	126,445,000		
		Orientasi dan KIE KRR bagi Pemuda dan Remaja		100 Org	100 Org	25,054,250	100 Org	30,000,000	100 Org	45,500,000	100 Org	50,050,000	100 Org	55,055,000	100 Org	60,560,500	DPPKB	Ambon
		Pelatihan Konselor sebaya Untuk PIK R		100 Org	100 Org	32,540,700	100 Org	35,000,000	100 Org	45,000,000	100 Org	49,500,000	100 Org	54,450,000	100 Org	59,895,000	DPPKB	Ambon
		Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Prosentase Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun	29,40	29,40		29,20		29,10		29,10		29,11		29,12			
		Jambore PIK R	Meningkatnya Pengetahun remaja Tentang KB	100 Org	100 Org	65,999,250	100 Org	70,000,000	100 Org	55,000,000	100 Org	60,500,000	101 Org	66,550,000	101 Org	73,205,000	DPPKB	Ambon
		Pelatihan Teknik Bermain dan Belajar dengan Anak							500 Org	100,000,000	500 Org	110,000,000	501 Org	121,000,000	501 Org	133,100,000		
		Mengenal Karakter Anak dan Golongan Darah							1200 Org	150,000,000	1200 Org	165,000,000	1201 Org	181,500,000	1201 Org	199,650,000		
		Jambore Saka Kencana Tingkat Nasional							8 Org	80,000,000	8 Org	88,000,000	8 Org	96,800,000	8 Org	106,480,000		
		Pelatihan dan pembentukan PIK KRR	Tersedianya Konselor KRR	100 Org	100 Org	14,913,700	100 Org	20,000,000	100 Org	45,000,000	100 Org	49,500,000	100 Org	54,450,000	100 Org	59,895,000	DPPKB	Ambon
		Pelayanan Administrasi Perkantoran																
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	70 Kg	70 Kg	2,590,000	70 Kg	2,590,000	70 Kg	6,000,000	70 Kg	6,600,000	71 Kg	7,260,000	71 Kg	7,986,000	DPPKB	Ambon
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	10,000,000	12 Bln	10,000,000	12 Bln	6,560,000	12 Bln	7,216,000	12 Bln	7,937,600	12 Bln	8,731,360	DPPKB	Ambon
		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersusunyua Dokumen Keuangan dengan	12 Bln	12 Bln	15,000,000	12 Bln	15,000,000	12 Bln	228,947,500	12 Bln	251,842,250	12 Bln	277,026,475	12 Bln	304,729,123	DPPKB	Ambon
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Pt	1 Pt	18,000,000	1 Pt	18,000,000	1 Pt	23,100,000	1 Pt	25,410,000	1 Pt	27,951,000	1 Pt	30,746,100	DPPKB	Ambon
		Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Tersedia Barang Cetakan dan penggandaan	1 Pt	1 Pt	18,000,000	1 Pt	18,000,000	1 Pt	18,150,000	1 Pt	19,965,000	1 Pt	21,961,500	1 Pt	24,157,650	DPPKB	Ambon
		Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedinya Komponen Listrik dan Penerangan	80 buah	80 buah	8,750,000	23 Bh	3,500,000	25 Bh	8,750,000	25 Bh	9,625,000	26 Bh	10,587,500	26 Bh	11,646,250	DPPKB	Ambon
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Pt	1 Pt	195,000,000	1 Pt	150,000,000	1 PT	64,065,000	1 PT	70,471,500	2 PT	77,518,650	2 PT	85,270,515	DPPKB	Ambon
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bln	12 Bln	12,000,000	12 Bln	12,000,000	12 Bln	12,100,000	12 Bln	13,310,000	13 Bln	14,641,000	13 Bln	16,105,100	DPPKB	Ambon
			Terlaksana	2 Kl	2 KL	30,000,000	2 Kl	35,000,000	2 Kl	60,000,000	2 Kl	66,000,000	3 Kl	72,600,000	3 Kl	79,860,000	DPPKB	Ambon

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Konsultasi keluar Daerah			404,178,625		405,187,500		627,000,000		689,700,000		758,670,000		834,537,000		
		Rapat Teknis Program Kependudukan dan KB	Terlaksanya Rapat Teknis KB	150 Org	150 Org	45,000,000	150 Org	45,000,000	150 Org	75,500,000	150 Org	83,050,000	151 Org	91,355,000	151 Org	100,490,500	DPPKB	Ambon
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Terpelihara	1 Unit	1 Unit	35,000,000	1 Unit	35,000,000	1 Unit	75,000,000	1 Unit	82,500,000	1 Unit	90,750,000	1 Unit	99,825,000	DPPKB	Ambon
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional	53 Unit	53 Unit	350,000,000	53 Unit	450,000,000	53 Unit	231,107,000	53 Unit	254,217,700	53 Unit	279,639,470	53 Unit	307,603,417	DPPKB	Ambon
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedian peralatan kantor yang baik	54 Unit	54 Unit	30,000,000	55 Unit	35,000,000	55 Unit	38,500,000	55 Unit	42,350,000	55 Unit	46,585,000	55 Unit	51,243,500	DPPKB	Ambon
		Peningkatan Kapasitas Aparatur																
		Pendidikan dan pelatihan Formal	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	5 Orang	5 Orang	75,000,000	5 Orang	75,000,000	5 Orang	90,000,000	5 Orang	99,000,000	5 Orang	108,900,000	5 Orang	119,790,000	DPPKB	Jakarta
		Study Tiru Model BKB Holistik Integratif							3 Orang	45,000,000	3 Oran	49,500,000	3 Oran	54,450,000	3 Oran	59,895,000		
		Study Tiru ke Luar Daerah	Meningkanya Kinerja Aparatur	5 Orang	5 Orang	75,000,000	5 Orang	75,000,000	5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		DPPKB	L,daerah
		Peningkatatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja																
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi SKPD	Tersedianya Lanporan Capaian Kinerja	1 Dok	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	17,500,000	1 Dok	19,250,000	2 Dok	21,175,000	2 Dok	23,292,500	DPPKB	L,daerah
		Pengembangan Website DPPKB	Tersedianya Website Dinas						1 Web	25,000,000	1 Web	27,500,000	2 Web	30,250,000	2 Web	33,275,000	DPPKB	Ambon
		Total				5,311,009,000		5,552,792,500		7,000,000,000		7,700,000,000		8,470,000,000		9,317,000,000		

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Ambon mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2017- 2022 sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Drop Out Peserta KB
6. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022, maka Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kunci dan Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk	4,10	4,00	3,80	3,50	3,40	3,30	3
2	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49) Tahun	2,20	2,15	2,10	2,05	2,00	1,95	1,90
3	Prosentase Peserta KB Aktif (CPR)	73,14	75	76	80	81	82	85
4	Prosentase PUS Menjadi Peserta KB Baru	21.02	21,10	21,20	21,50	21,60	21,70	22,00
5	Prosentase Drop Out Peserta KB	17,78	17,70	17,50	17,30	17,20	17,10	17.00
6	Prosentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	14,48	14,30	14,20	13,80	13,60	13,20	13,00
7	Prosentase PUS yang Istrinya di Bawah 20 Tahun	2,15	2,10	2,05	2,00	1,95	1,90	1,85
8	Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	29,60	29,40	29,20	29,10	28,90	28,80	28,50

VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berperan aktif dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 meliputi sasaran Pemerintah Kota Ambon dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon. Untuk itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yg layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Renja Tahunan.

Sasaran Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh seluruh jajaran lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon termasuk UPTD Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan

Pencapaian sasaran-sasaran tahun 2017-2022 ditetapkan berdasarkan program-program yg tercantum dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Permendagri No.13 Tahun 2006.

Upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 yang penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan didukung dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah termasuk oleh masyarakat dan swasta.

Monitoring dan evaluasi Rensra Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon termasuk UPTD yg menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yg telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip (AKIP) dalam bentuk (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam melaksanakan Renstra Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2022 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung

jawab, moral dan dedikasi yg tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Rencana Strategis ini dibuat dalam proses menuju penerapan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Oleh karena itu Rencana Strategis ini masih memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yg ada antara lain masukan dari setiap program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan. Disamping itu juga memperhatikan situasi perkembangan masyarakat, Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019, serta perkembangan regional/global disamping perkembangan ilmu pengetahuan.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2017-2022. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yg memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yg jelas.

Ambon,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kota Ambon

Ir. J. W. Patty, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19680114 199312 2 001